

## KONSOLIDASI DEMOKRASI

**Kris Nugroho**

Dosen FISIP Unair; lulusan Unair (S-1) dan UI (S-2)

### Abstract

Political transition in Indonesia is a crucial phase that determines political stability in the future. Indonesian political system will be more democratic if it has two conditions: (a) the political institutions work as political instrument for political accomodation of the people, and (b) political elite reduces their political conflicts, develops a strong concensus for the future of political reform.

**Keywords:** Indonesia, elite, consolidation, political reform, democratisation, consolidation

Kelangsungan masa depan suatu sistem politik yang tengah mengalami transisi menuju demokrasi sangat bergantung sekali pada keberhasilannya dalam melewati proses transisi menuju demokrasi politik secara stabil, damai atau non kekerasan. Adanya transisi politik secara damai akan memberi penekanan bahwa lembaga-lembaga politik yang ada beserta elitnya baik pada lapisan elite mau pun pada lapisan masyarakat berada pada ketahanan yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan politik yang berlangsung beserta konsekuensi-konsekuensinya.

Beberapa sistem politik berhasil dalam proses transisi demokrasi, tapi ada pula beberapa di antaranya yang melaluinya (transisi demokrasi) dengan penuh gejolak bahkan berada dalam ancaman keruntuhan nasional. Be-

berapa negara Eropa Timur lebih berhasil melalui masa-masa transisi demokrasi dengan sukses yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu bebas yang diikuti banyak partai. Tapi untuk kasus Uni Soviet, agaknya berjalan lain, yaitu transisi demokrasi yang dipelopori dengan munculnya ide-ide radikal tentang keterbukaan dan restrukturisasi politik dari presiden Michael Gorbachev menghasilkan Uni Soviet yang terpecah-pecah ke dalam ikatan-ikatan negara-negara etnik.

Di Indonesia, proses transisi demokrasi yang diawali dari kejatuhan regim orde baru Soeharto tahun 1998 berlangsung dengan penuh gejolak konflik elite, konflik etnik, agama dan munculnya gerakan pemisahan (separatisme). Melihat situasi dan perkembangan terakhir dalam politik nasional, ada kecenderungan bahwa transisi

menuju demokrasi secara damai atau non kekerasan masih jauh dari kenyataan. Sebaliknya, fenomena dan ancaman terjadinya kekerasan politik tetap lah tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang sedang bergolak seperti Aceh, kepulauan Maluku dan Papua (Irian Jaya). Konflik kedaerahan -- primordial dalam perspektif, etnis dan agama-- menunjukkan peningkatanannya.

Dampak konflik antar elite politik, elite vs massa serta munculnya fenomena kekerasan daerah demikian akan merenggangkan hubungan antar elemen-elemen bangsa, menciptakan ketegangan hubungan antara pusat dan daerah serta berpotensi ke arah terjadinya disintegrasi bangsa.

Sementara itu, tak dipungkiri, suhu politik juga makin meninggi di pusat kekuasaan (Jakarta) berkaitan dengan respon kalangan partai-partai politik di DPR yang menilai bahwa kinerja pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid sangat buruk. Tekanan agar Presiden Wahid mundur secara suka rela digemakan kalangan oposisi dan mahasiswa. Sementara upaya untuk mempertahankan posisi kepresidenan Wahid makin kecil, maka akhir pemerintahannya tinggal menghitung hari. Upaya untuk melakukan SI MPR guna menurunkan Presiden Wahid pun dilancarkan terutama oleh kalangan parpol seperti poros tengah, PDI P dan Golkar yang pada SU 1999 mendukung tampilnya

Wahid sebagai presiden. Dampak pemanasan suhu politik elite nasional ini membuat hubungan antara massa NU-Muhammadiyah berada dalam situasi saling curiga karena salah satu motor oposisi terhadap Presiden Wahid adalah ketua MPR sekaligus ketua umum PAN dan tokoh poros tengah Amien Rais.

Konvergensi antara model konflik horisontal ( primordial) dan vertikal (elite) tidak saja akan mempengaruhi relasi-relasi kekuasaan di tingkat nasional mau pun lokal tapi juga akan memupuskan harapan bagi berkembangnya institusionalisasi nilai-nilai dan kesepakatan-kesepakatan demokrasi yang dulunya pernah menjadi cita-cita bersama para elite di awal gerakan reformasi. Semua indikator ketidakstabilan politik domestik di atas memberi penekanan bahwa konsolidasi demokrasi kalangan sipil di Indonesia secara politik sangat lemah yang salah satu sebabnya adalah kuatnya kepentingan-kepentingan politik mereka yang terfragmentasi

### Konsep Konsolidasi Demokrasi

Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik, baik partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan mau pun

masyarakat politik (O'Donnel dan Schmitter, 1993: 24-6). Unsur penting lainnya dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama menyangkut "nilai-nilai politik" yang bisa mendekati dan mempertemukan berbagai elemen politik di atas menjadi suatu kekuatan yang relatif padu selama transisi menuju demokrasi.

Suatu regime politik sipil presiden yang sedang mengalami transisi demokrasi diperhadapkan dua pilihan. Pertama, menjalani transisi demokrasi dengan tingkat konsolidasi elite yang padu (solid) ke arah satu tujuan tercapainya demokratisasi politik. Kedua, menjalani transisi demokrasi yang berliku-liku dengan tingkat kepaduan elite sangat rapuh, penuh konflik dan gejala politik massa.

Sedangkan makna transisi demokrasi berarti fase peralihan atau perubahan dari suatu fase tertentu ke fase yang lain yang tak sama dengan fase pertama. Kongkritnya, transisi demokrasi diartikan sebagai fase peralihan regim politik dari tipe otoriter menuju regim politik pasca otoriter (O'Donnel dan Schmitter 1997:6-7).

Menurut O'Donnel dan Schmitter (1997), masa transisi umumnya ditandai dengan munculnya "liberalisasi", yaitu proses pengaktifan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan negara

atau pihak ketiga. Dengan demikian, liberalisasi dikaitkan dengan iklim pengembangan kebebasan hak-hak untuk menjalin atau mendapatkan akses politik yang lebih luas dari masyarakat. Hal ini bisa berarti liberalisasi politik dalam konteks timbulnya pluralisme politik.

Dalam bahasa Giovanni Sartori (1997:62), pluralisme politik diidentikan dengan "diversification of power" atau polyarchy yaitu kondisi di mana distribusi kekuasaan politik terpecah di sejumlah kekuatan-kekuatan atau kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, tidak ada lagi monopoli kekuasaan politik di satu struktur kekuasaan tertentu (monolitik). Yang terjadi adalah dinamika peta isu-isu politik dan kepentingan, masyarakat "terbelah" ke dalam asosiasi-asosiasi kepentingan yang saling berkonflik, berkonsensus dan bahkan bertoleransi untuk mencapai keseimbangan baru.

Berikutnya adalah proses demokratisasi politik, yaitu mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik secara stabil. Meminjam istilah Huntington, demokratisasi dikaitkan dengan institusionalisasi politik di mana tuntutan-tuntutan serta dukungan-dukungan politik dari publik mendapat tempat secara prosedural dalam kerangka suatu penyelesaian konflik.

Masa transisi sangatlah kritis sebab tak ada jaminan bahwa proses transisi akan selalu menghasilkan regim demokratis. Pergolakan-pergolakan internal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, budaya dan politik berpeluang menjadi ketidakpuasan massal yang mengancam kohesi sosial masyarakat. Begitu pula, sikap-sikap politik otoriter akan kembali lagi berkuasa bilamana kohesi regim transisi lemah atau tidak kredibel secara politik sehingga mendorong kekuatan-kekuatan pro regim lama yang otoriter bangkit kembali.

Untuk kasus Indonesia, transisi demokrasi dimulai dengan tanda-tanda berikut: krisis ekonomi domestik yang berdampak pada krisis keuangan dan perbankan serta munculnya penolakan massa terhadap perangkat-perangkat politik regim seperti militer, Golkar sebagai partai penguasa, birokrasi dan presiden. Penolakan massa atas simbol-simbol regim ini menggoyahkan kemampuan politik yang dibangun 3 dekade melalui instrumen kekerasan militer, ideologi dan pengeangan oposisi.

Dalam konteks perubahan politik dan dikaitkan terjadinya gelombang demokratisasi politik yang melanda banyak sistem politik di era 1990-an, transisi demokrasi ditandai dengan munculnya regim-regim politik baru di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika yang sedang bergerak menuju demokrasi. Termasuk

dalam hal ini, regim sipil Presiden Wahid bisa dikatakan mewakili regime transisi dari authoritarian regime ke post authoritarian regime yang lebih demokratis, dengan kecenderungan-kecenderungan visi dan misi politiknya yang masih perlu diperdebatkan.

Hal lain mengapa konsolidasi demokrasi perlu dilakukan adalah untuk membangun regime demokratis yang kuat dan melembaga setelah runtuhnya regim otoriter. Setelah regime otoriter berakhir, situasi politik tidak menentu (chaos), fragmentasi sipil, militer frustrasi dan merasa terpojokan atas perannya mendukung regime masa lalu dan norma, aturan dan prosedur (*rule of the game*) baru yang mewakili sistem demokrasi belum terbentuk. Itulah sebabnya konflik-konflik menjadi terbuka dan sulit dikendalikan mengingat penguasa baru belum punya pijakan politik yang bisa absah diterima semua kelompok politik guna melembagakan konflik-konflik politik yang muncul.

Dengan demikian, tahapan berikutnya yang dilakukan penguasa demokratis baru setelah pemerintahan otoriter runtuh adalah dibangunnya regime demokratis yang meliputi nilai, norma dan institusi demokrasi serta pengkonsolidasian regime demokratis baru (Huntington 1995:45).

Asumsi di balik perlunya konsolidasi demokrasi adalah lemahnya kekuatan-kekuatan sipil demokrasi, yang di awal keruntu-

han regime otoriter tercerai-berai akibat pandangan politik yang beragam, mereka berangkat dari kepentingan dan motivasi serta ideologi politik yang juga berbeda. Di samping itu, visi elite menyangkut prioritas kebijakan-kebijakan politik apa yang harus diambil di era transisi belum terbentuk atau kalau pun ada masih cenderung terpolarisasi. Mengutip pendapat Chalmers Johnson, dalam era perubahan politik, khususnya revolusi dan reformasi politik besar, ketidakseimbangan selalu muncul yakni suatu situasi di mana nilai-nilai, persepsi-persepsi atau kepercayaan-kepercayaan para elite politik, masyarakat, institusi-institusi politik dan sistem ekonomi tidak tersinkronisasi dan tidak saling memperkuat. Dengan situasi tersebut, konflik-konflik politik acapkali berlangsung terbuka.

Prioritas politik menyangkut arah transisi demokrasi menjadi faktor penting yang harus disepakati oleh para elite politik. Dalam permasalahan ini (transisi demokrasi), kata reformasi politik menjadi substansial karena tujuan selama fase transisi adalah menghadirkan regim politik baru dengan prioritas kebijakan-kebijakan reformasi politik besar. Kebijakan-kebijakan reformasi politik besar ini meliputi empat aspek (Michael dan Dickson 1998:4-5).

1. Hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya basis yang dipakai negara untuk

memperoleh respon-respon masyarakat terhadap terhadap perintah-perintahnya, yaitu basis legitimasi dan dukungan;

2. hubungan antara negara dan ekonomi;
3. distribusi kekuasaan dan otoritas di antara dan di dalam institusi-institusi politik dan kenagaraan yang utama (kepala negara, militer, kehakiman, kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, birokrat pusat, daerah dan lokal);
4. hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik negara dengan dunia luar.

#### Kasus Indonesia: Ketidakpastian

Mengamati proses transisi menuju demokrasi untuk kasus Indonesia akan nampak bahwa fase transisi demokrasi akan ditempuh relatif panjang dan bergejolak. Diwarnai konflik elite politik, konflik primordial dan ancaman-ancaman pemisahan diri dari beberapa propinsi (Aceh dan Papua/Irian Jaya), transisi demokrasi di Indonesia berlangsung dalam konteks rendahnya kohesi sosial.

Hal ini nampak sejak awal tampilnya partai-partai politik baru yang kini memperoleh kursi di DPR masih jauh dari adanya kepaduan misi politik guna menyukseskan demokratisasi politik. Bahkan pembagian "historis politis" antara kelompok status quo --yang diidentikan pen-

dukung orde baru-- dengan kelompok pro reformasi kian jelas. Kini garis kepentingan politik bukan ditentukan oleh masa lalu yang anti status quo, tapi oleh sejauhmana terjalin titik temu yang sama di antara kekuatan-kekuatan politik untuk melancarkan tindakan politik bersama ke arah suatu kepentingan politik tertentu. Misalnya, politisasi kasus pencopotan Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla, dan Buloggate guna mengejar Presiden Wahid sampai pada tingkat bersalah sehingga layak di-SI-kan.

Dalam satu segi pemerintahan sipil Presiden Wahid cukup berhasil dalam memperlebar sayap "masyarakat warga", yang ditandai dengan makin bebasnya wacana demokrasi, kebebasan, independensi politik dan mendidik masyarakat untuk mampu membedakan antara wilayah kewenangan pemerintah/negara dan wilayah di mana masyarakat bisa mengurus kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, Presiden Wahid setidaknya telah mengupayakan satu aspek dari empat aspek yang oleh Oksenberg dan Dickson (dikemukakan terdahulu).

Dalam bahasa politis, Presiden Wahid telah melakukan proses dekonstruksi legitimasi politik antara negara dan masyarakat dan di satu sisi mengurangi efek politis atas lembaga kepresidenan yang sangat dikeramatkan oleh di masa orde baru. Dekonstruksi politik ini terjadi berkat adanya amandemen

oleh MPR atas pasal-pasal UUD 1945, terutama pasal-pasal yang memberi bobot kekuasaan yang besar kepada lembaga kepresidenan. Desakralisasi lembaga kepresidenan ini akan menjadi babak baru dalam hubungan DPR- presiden (pemerintah) di mana yang pertama diharapkan akan mampu memainkan peran kontrol politiknya atas pemerintah secara proporsional.

Titik didih untuk memasuki babak politik yang secara kualitatif penuh kekerasan sebetulnya telah dimulai tatkala terjadi perang pernyataan antar elite politik berkenaan dengan karakteristik pemerintahan Presiden Wahid.

Banyak kalangan politisi yang dulu mendukung Presiden Wahid, sekarang berbalik menyerangnya. Aliansi strategis partai-partai pendukung Presiden Wahid satu per satu menyatakan kekecewaan mereka atas kinerja pemerintahannya yang dinilai kontroversi dan *one man show*. Mereka mengkritik keras Presiden Wahid atas kegagalannya dalam menanganinya Aceh dan Papua. Mereka juga menilai pemerintahannya tidak punya visi yang jelas dalam menangani kasus-kasus BLBI, mengintervensi BI dan terlibat bagi-bagi posisi di departemen basah. Tuduhan neo KKN pun mencuat seiring meledaknya skandal uang 35 milyar milik Yanatera Bulog yang diduga melibatkan Presiden Wahid. Adanya penyelesaian intensif DPR dengan membentuk Pansus Bulog yang

saat ini sedang berjalan, diharapkan akan mengungkapkan posisi sebenarnya Presiden Wahid dalam kasus Bulog ini.

Dalam setahun ini kita juga melihat, suhu politik meningkat seiring makin buruknya komunikasi politik antara politisi DPR dengan pemerintah. Buruknya komunikasi politik keduanya ini tidak saja disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik praktis antara pemerintah dengan kekuatan partai-partai, tapi juga disebabkan oleh tidak adanya konsensus politik minimal yang dibutuhkan sebagai modal menyusun desain besar reformasi politik ke depan. Yang justru terjadi adalah gesekan-gesekan politik yang direpson secara emosional oleh elite pemerintah dan non pemerintah.

Sebagai contoh, dinamika politik sepanjang 2000 diwarnai oleh benturan interpretasi hukum/normatif atas beberapa langkah kebijakan Presiden Wahid (kasus pencopotan Laksamana, Kalla dan Rusdihardjo) yang dinilai partai-partai di luar kubu Presiden Wahid sebagai tidak konstitusional. Artinya, kita melihat, demokrasi normatif dan institusional (UUD, partai politik dan parlemen) yang berfungsi sebagai instrumen pelembagaan konflik dalam kenyataannya, tidak mampu menjadi payung politik yang menaungi kepentingan-kepentingan politik bangsa yang lebih luas.

Titik krusial dinamika politik saat ini adalah bagaimana elite-elite politik menyadari betapa be-

rat konsekuensi yang akan terjadi jika halangan-halangan demokrasi tidak bisa diatasi. Sistem yang tengah dibangun akan ambruk secara politik kalau misalnya wilayah-wilayah yang bergolak memilih eksistensi politiknya sendiri. Tatanan politik juga terancam hancur jika tensi pergolakan politik kedaerahan tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan politik lokal dan nasional sehingga tidak mampu diselesaikan secara damai.

Pemburukan situasi politik ini jelas akan memudahkan rentang kendali legitimasi Jakarta. Pemerintah mulai kehilangan kontrol kewenangan politiknya atas masyarakat. Kewibawaan pemerintah pun dipertanyakan mengingat ketidakmampuannya mengendalikan konflik-konflik horisontal yang saat ini di Aceh Maluku dan Papua.

Dengan demikian, masa transisi menuju demokrasi di Indonesia cenderung akan berjalan keras atas dasar pertimbangan konvergensi faktor struktural dan kultural berikut : ketiadaan kewibawaan hukum, pijakan norma-norma demokrasi masih lemah, perbedaan tafsir elite atas arah reformasi politik, adanya elite-elite oportunistik politik yang hanya sekedar ingin berkuasa dan potensi tak terkendali aksi-aksi kekerasan massa yang dengan mudah menyulut terjadinya kerusuhan sosial. Konvergensi demikian dalam kenyataannya telah menghasilkan pusaran dinamika

politik yang sangat destruktif bahkan di beberapa wilayah, tertib politik terancam runtuh.

Ancaman ambruknya institusi demokrasi ini dimungkinkan selain karena gagalnya resolusi konflik, juga dimungkinkan oleh makin banyaknya konflik-konflik sosial politik yang cenderung diselesaikan lewat jalur non institusional (kekerasan). Politik kekerasan ini tak harus berwujud fisik, tapi juga ancaman-ancaman ideologi dan penggunaan bahasa (jargon politik) sebagai pembenar kekuasaan politik tertentu.

Adanya perilaku elite baik di dalam pemerintah dan di luar pemerintah yang masih menggunakan bahasa-bahasa ancaman seperti ini, menggambarkan betapa institusi demokrasi saat sedang di ambang keambrokannya. Seiring gejala ini, kewibawaan pemerintah, institusi politik dan hukum makin menurun, setidaknya hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat menggunakan cara-cara kekerasan sebagai jalan keluar menyelesaikan suatu masalah. Hal menggambarkan juga, betapa legitimasi politik dan hukum sudah di ambang keambrokannya. Dengan sendirinya, legitimasi pemerintah pelan-pelan mulai tercabut dan membuat pemerintahan saat ini terlalu sulit untuk mengonsentrasikan diri guna melakukan konsolidasi demokrasi secara luas.

Secara politik, kewibawaan Presiden Wahid sudah tidak ada apa-apanya dengan jangkauan ke-

kuasaan politik yang makin memudar. Pada saat yang sama ia dituntut untuk menggolkan salah satu misi reformasi, yaitu pengusutan kasus dugaan KKN Soeharto dan kroni-kroninya. Tapi pada saat yang sama politisasi atas kasus-kasus seperti Bulog dan BI akan membuat citranya makin merosot.

Keberhasilannya untuk memulihkan kredibilitas politik pemerintahannya tergantung pada kemampuannya membalik arah pendulum politik, dari pihak yang diserang menjadi pihak yang mengendalikan dan menyerang musuh-musuhnya. Tapi kalau tidak, posisi kepresidenannya tidak akan bertahan sampai SU MPR 2001.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, transisi demokrasi merupakan titik krusial yang harus dilalui dengan aman di mana respon-respon elite terhadap persoalan-persoalan politik domestik harus menghasilkan konsensus minimal atau *political pact* antar aktor politik yang berkonflik (Patriadi, 2001:7). Artinya antar elite harus tercipta kondisi politik yang kondusif bagi lahirnya komitmen untuk menyelamatkan arah reformasi politik dengan munculnya kesepakatan-kesepakatan minimal menyangkut persoalan-persoalan reformasi domestik. Skala prioritas politik apa yang harus diwujudkan di awal transisi juga harus dirundingkan di antara elite tanpa mengurangi hak-hak dan kewenangan politik pihak

yang memegang kendali pemerintahan.

Dalam konteks perubahan politik yang cepat dan terfragmentatif seperti di Indonesia ini, tepa tlah kalau elite mengembangkan *consosional democracy* (Przeworski, 1995:11) Inti demokrasi konsosional ini adalah antar politik yang rivalitas saling mengakui bahwa mereka memiliki perbedaan-perbedaan yang esensial yang perlu diselesaikan. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk saling mengakui eksistensi setiap segmen politik yang ada sehingga yang muncul adalah pergolakan politik transisional yang terkendali tanpa mengorbankan hakekat reformasi itu sendiri. Untuk itu arah pergolakan politik harus berubah dari corak *zero sum conflict* ke *non zero sum conflict* di mana terdapat konsensus-konsensus guna menyelamatkan arah reformasi politik.

Untuk itu, arah permainan politik harus berubah di dua arah, dari arah presiden yang harus secepatnya mengubah gaya permainan politiknya dengan menciptakan "solusi damai" dengan poros-poros kekuasaan yang kini dijauhinya dan dari arah oposisi (terkonsentrasi di DPR) yang cenderung konfrontatif terhadap presiden. Solusi damai ini setidaknya untuk meminimalkan korban-korban kemanusiaan (*cost of life*) yang terjadi selama proses transisi demokrasi. Solusi damai ini artinya, Wahid harus melakukan konsolidasi demokrasi, den-

gan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, melakukan konsolidasi antar kekuatan politik guna mencapai konsensus minimal politik guna menggagas desain reformasi yang diinginkan.

Kedua, berinisiatif pranata-pranata sosial politik yang hancur di wilayah-wilayah konflik, setidaknya hal ini akan mengurangi sumber-sumber ketegangan politik di daerah.

Ketiga, konsisten dalam penegakan hukum terutama kasus-kasus KKN baik yang saat ini terganjal diusut.

Keempat, membuka jalur dialog multi poros politik, setidaknya untuk menghindari frustrasi politik pihak-pihak yang tidak terakomodasi dalam pemerintahannya.

#### Daftar Pustaka

- Guillermo O' Donnel dan Phillippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 1993).
- Oksenberg, Michel dan Dickson J. Bruce, *Kerangka Teoritis Reformasi Politik* (terj) New York, Harper-Collins Publishers, 1991
- Patriadi, Bayu, "Lembaga Politik Dan pelembagaan Demokrasi," makalah seminar

**nasional yang diselenggara-  
kan Universitas Negeri Jember  
kerjasama dengan Setjen  
MPR, 2-3 Februari 2001**

**Samuel P. Huntington,** *Gelombang  
Demokratisasi Ketiga* (Ja-  
karta: Grafiti, 1995)

**Sartori, Giovanni,** "Understanding  
Pluralism," *Journal of De-  
mocracy*, Vol. 8, No. 4, Octo-  
ber 1997.